

BAB V

KESIMPULAN

Pantai Gading merupakan negara penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dimana hampir 40 persen kebutuhan biji kakao dunia dihasilkan di negara ini. Faktanya biji kakao tersebut ditanam dan dipanen menggunakan tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak tersebut berusia sekitar 12 hingga 16 tahun bahkan ada yang berusia 9 tahun. Hal ini berhasil diungkapkan oleh salah satu media barat bahwa perbudakan anak tersebar di industri kakao Pantai Gading. Perbudakan anak yang terjadi di industri kakao tersebut telah melanggar hak-hak asasi manusia. Sebagai organisasi yang mengatasi masalah ketenagakerjaan, Organisasi Buruh Internasional perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah pekerja anak tersebut. ILO menilai masalah pekerja anak tersebut telah melanggar Konvensi ILO NO.138 mengenai Usia Minimum Bekerja dan Konvensi No.182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk pada Anak.

Terjadinya pelanggaran pekerja anak di Pantai Gading berawal ketika kakao menggantikan kopi sebagai komoditas utama yang menyebabkan pemerintah mendorong budidaya penanaman kakao. Penekanan produksi kakao telah membudaya dalam negara ini sehingga petani bergantung pada kakao sebagai mata pencaharian mereka. Padahal harga kakao di pasar dunia bersifat fluktuatif yang tidak dapat dikontrol oleh petani kakao dan kondisi alam yang dapat mempengaruhi hasil kakao. Hal ini membawa pengaruh negatif kepada para petani kakao dimana mereka mencari cara untuk memotong biaya kerugian sewa

lahan dan pembelian kebutuhan tanaman kakao dengan menggunakan tenaga kerja murah dengan memperkerjakan budak. Pekerja anak yang ada di industri kakao tentu melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan industri kakao belum mengambil langkah untuk mengatasi masalah pekerja anak ini. Padahal perusahaan cokelat atau industri kakao memiliki kekuatan untuk mengakhiri pekerja anak dan kerja paksa dengan memberikan upah yang layak untuk produk yang dihasilkan mereka. Inilah beberapa perusahaan cokelat yang ada di Pantai Gading yaitu Kraft (USA), Mars (USA), Nestle (Switzerland), Ferrero Group (Italy), Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (Switzerland) dan lain-lain.

Perbudakan anak di Pantai Gading disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kemiskinan, yang menyebabkan orangtua disana membiarkan anak-anak mereka bekerja. Mereka bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri. Orang tua disana tidak mampu mengirim anak-anak mereka sekolah karena pendidikan yang mahal. Apalagi banyak anak-anak disana yang tidak memiliki akte kelahiran yang digunakan untuk mendaftar sekolah. Orangtua disana menganggap bahwa membiarkan anak bekerja merupakan bagian dari asuhan orangtua supaya anak memiliki kehidupan yang lebih baik kedepannya. Faktor kedua adalah mempekerjakan anak merupakan budaya. Budaya yang dimaksudkan disini adalah mempekerjakan anak-anak merupakan hal yang biasa dan tidak dianggap salah. Secara tradisional, keluarga disana mengirimkan anak-anak untuk dipekerjakan di industri kakao di Pantai Gading karena Pantai Gading dipandang sebagai tempat yang menjanjikan untuk menghasilkan uang dan belajar sesuatu yang baru. Migrasi anak-anak dari

negara tetangga dianggap sebagai hal umum dan menjadi bagian dari budaya. Bahkan di beberapa daerah seperti Burkina Faso dan Mali mengatakan bahwa ketika ada keluarga yang tidak mengirim anak mereka ke Pantai Gading, maka keluarga tersebut tidak makmur atau sejahtera. Padahal dampak yang diakibatkan adanya perbudakan akan mempengaruhi kondisi anak secara fisik dan psikologi. Mereka juga akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dirinya kembali ke keluarga mereka akibat trauma yang diterimanya.

Negara Pantai Gading tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan pekerja anak yang terjadi di negaranya. Apalagi negara ini sempat mengalami krisis politik yang berkepanjangan. Disini peran ILO, sebagai organisasi internasional diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan pekerja anak di negara ini. Upaya yang dilakukan oleh ILO dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan bantuan pembangunan humaniter dan bantuan teknis yang bekerjasama dengan donor lainnya. Dalam memberikan bantuan pembangunan humaniter, ILO melakukan lima komponen yaitu : pertama, melakukan pengembangan kapasitas/ *capacity building* dengan membangun kerjasama dengan industri kakao dan LSM untuk berpartisipasi menangani pekerja anak. Kedua, melakukan perlindungan anak dengan menarik anak-anak dibawah 18 tahun untuk didaftarkan kembali sekolah dan menerapkan program keaksaraan bagi orang dewasa. Ketiga, Sistem pemantauan anak-anak dilakukan dengan mendirikan sistem pemantauan dan verifikasi anak untuk mengumpulkan dan mengolah data pekerja anak yang terlibat secara nasional. Keempat, mobilisasi sosial dilakukan dengan melakukan kampanye dan sosialisasi untuk

meningkatkan kepedulian masyarakat akan perbudakan anak. Kelima, pembentukan pengetahuan dasar untuk masyarakat dengan mendirikan komite pengelolaan kegiatan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi pendapatan bagi korban bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak.

ILO memberikan bantuan teknis melalui kerjasama dengan donor lainnya seperti bekerjasama dengan Negara Amerika Serikat , UNICEF dan Pemerintah Pantai Gading. Bantuan Teknis yang diberikan oleh Amerika Serikat diawali dengan adanya Protokol Harkin Engel yang diinisiasi oleh perwakilan pemerintah AS Tom Harkin dan Elliot Engel pada tahun 2001. Isi dalam protokol ini adalah untuk meminta kerjasama industri kakao yang ada di Pantai Gading dalam rangka menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan buruk pada anak. Di dalam protokol ini, konvensi ILO No.182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak digunakan sebagai acuan dan ILO berfungsi sebagai pengawas jalannya protokol. Namun, setelah 4 tahun penandatanganan, protokol ini dinilai tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Tetapi pada tahun 2011, Pemerintah Pantai Gading menegaskan kembali komitmennya pada protokol ini dengan menandatangani Deklarasi Aksi mendukung Protokol Harkin Engel. Tidak hanya itu saja, Departemen Tenaga Kerja AS juga memberikan bantuan dana untuk proyek regional sebesar 7,95 juta dolar AS dan 5 juta dolar AS kepada Pantai Gading yang dilaksanakan oleh ILO. Dana tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak korban perbudakan dan anak-anak yang bekerja sebagai pelayan rumah tangga dan *workshop* terkait dengan pekerja anak.

Bantuan teknis yang diberikan melalui kerjasama ILO dengan UNICEF diawali dengan pembentukan *platform Libreville* pada tahun 2000. Platform ini mengenai konsultasi dan kerjasama untuk mengatasi perdagangan anak di Afrika Barat dan Tengah. Konsultasi tersebut diberikan guna membangun persepsi yang sama untuk segera menangani dan melarang segala bentuk perdagangan anak. Namun, platform ini hanya berjalan selama 2 tahun saja. Setelah berakhirnya platform tersebut, ILO dan UNICEF kembali bekerjasama untuk mendirikan Komite Nasional dan kerangka kerjasama untuk memerangi perdagangan anak. Kerjasama tersebut dilakukan melalui upaya advokasi dengan mengajak pemerintah nasional dan lokal untuk melakukan kampanye perdagangan anak, meningkatkan akses pendidikan melalui pelatihan kejuruan dan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi anak-anak, pengembangan kapasitas dengan membentuk komite perlindungan anak, dan membangun kerangka hukum untuk memperkuat perlindungan hukum kepada korban bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak.

Bantuan teknis melalui kerjasama ILO-IPEC dengan Pemerintah Pantai Gading adalah dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Melawan Perdagangan, Eksploitasi dan Pekerja Anak (2012-2014). Tujuan Rencana Aksi Nasional tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mencegah anak-anak terlibat dalam perbudakan dan perdagangan anak. Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbudakan adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas ketenagakerjaan dan pejabat pemerintah. Pelatihan tersebut diberikan supaya mereka memiliki pengetahuan yang cukup

dan peduli terhadap pelanggaran hak asasi kepada anak-anak yang terlibat dalam perbudakan. Meskipun Pemerintah Pantai Gading telah menjalankan program dan berkoordinasi dengan industri kakao, organisasi internasional dan LSM, namun negara ini belum mampu mengatasi permasalahan pekerja anak yang terjadi. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses dan dana untuk menjalankan program tidak mampu mencukupi seluruh daerah dan korban pekerja anak. Tetapi upaya yang diberikan oleh ILO untuk mengatasi masalah pekerja anak ini membawa penurunan jumlah pekerja anak di Pantai Gading. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dunia ILO yang terdapat di dalam “*Marking progress against child labour 2000-2012*” yang diluncurkan tahun 2013.